JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), Februari 2020, pp.183-186
DOI 10.33087/jiubj.v20i1.844
ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print)
Vinna Novita Sari, Suhairi, Nini Syofriyeni

Efek *Ratchet* terhadap Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Pemerintah Kota Se Sumatera

Vinna Novita Sari[1], Suhairi[2], Nini Syofriyeni[3]
[1,2,3]Program Studi Magister Akuntansi Universitas Andalas
Correspondence email: vinnanovita.malereang@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efek *Ratrchet* pada Anggaran Pemerintah daerah di Pemerintah Kota Se Sumatera serta mengetahui Kota mana yang memiliki tingkat *Budget Ratcheting* Tertinggi. Penelitian dalam riset ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Se Sumatera. Teknik analisis dalam penelitian ini menghitung dan menganalisis budget Ratcheting dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Se Sumatera Berpengaruh terhadap Belanja Daerah, *Budget Ratcheting* sebagai variabel moderasi memperkuat Hubungan tersebut, serta Kota Palembang merupakan kota yang memiliki tingkat *Budget Ratcheting* tertinggi dengan persentase 65 %.

Kata kunci : budget ratcheting; belanja daerah; PAD

Abstract. *This study aims to determine the Ratrchet Effect on Local Government Budgets in the City Government of Sumatra and find out which cities have the highest level of Budget Ratcheting. The research in this research is quantitative descriptive research. The data used are secondary data in the form of Regional Budget Revenue and Expenditure Reports of the City Government of Sumatra. The analysis technique in this study calculates and analyzes the Ratcheting budget with multiple linear regression analysis methods. The results of this study indicate that the Regional Original Revenue of the City Government of Sumatra Affects Regional Expenditures, Budget Ratcheting as a moderating variable strengthens the Relationship, and Palembang City is a city that has the highest Budget Ratcheting level with a percentage of 65%.*

Keywords: *badget ratcheting; budgeting; own revenue*

PENDAHULUAN

Adanya pemberian kewenangan untuk otonomi daerah tidak membuat pemerintah pusat lepas tangan terkait dengan pemenuhan dana daerah. Pemerintah Pusat tetap memberikan bantuan dalam bentuh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil dari pajak dan sumber daya alam. Bahkan dalam penggunaannya pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah akan mampu menggunakan dana bantuan tersebut baik secara efektif maupun efisien guna terciptanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran Pemerintah di Indonesia merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja pemerintah yang diukur dengan membandigkan realisasi anggaran dengan anggaran yang direncanakan (Bawono, Halim, & Lord, 2012). Pengukuran kinerja dilakukan oleh badan legislatif untuk mengambil keputusan mengenai alokasi anggaran tahun berikutnya pada setiap bagian organisasi pemerintah daerah (Satuan Kerja Pemerintah Daerah / SKPD).

Anggaran pemerintah daerah disusun setiap tahun dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Pedoman tersebut mengatur penentuan prakiraan setiap komponen APBD (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan) dengan memperhatikan peraturan perundangan pada setiap komponen, asumsi makro ekonomi, dan realisasi anggaran pada periode sebelumnya. Struktur APBD terdiri dari 3 komponen, yaitu: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan penyusunan anggaran untuk setiap komponen APBD tersebut didasarkan pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) setiap tahun anggaran. Pedoman tersebut berisi paparan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Hasil sinkronisasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam KUA dan PPAS yang disepakati antara eksekutif dan legislatif (DPRD). Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berisi perkiraan yang menjadi dasar penentuan besaran anggaran untuk setiap komponen APBD. Penganggaran untuk setiap komponen APBD merupakan perkiraan yang diukur secara rasional, terukur dan memiliki dasar kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Varian anggaran organisasi pemerintah menyediakan informasi mengenai kapasitas kinerja dan capaian target kinerja serta kesesuaian alokasi anggaran dengan target iyuran program yang ditetapkan pemerintah. Dalam literatur akuntansi manajemen, varian anggaran memperlihatkan memperlihatkan peran perencanaan program/ kegiatan, menyediakan informasi

kinerja anggaran sebagai basis penilaian prestasi manajemen yang selanjutnya akan menentukan besaran alokasi anggaran bagian satuan kerja dalam manajemen pada periode berikutnya. Penggunaan varian anggaran sebagai basis dalam penentuan target anggaran merupakan konteks yang menunjukan inkrementalisme pada anggaran, Ingkrementalisme memiiki asosiasi negatif jika anggaran periode sebelumnya mengandung bias akibat perilaku oportunistik penyususn anggaran dalam bentuk penciptaan senjangan *(slak)* anggaran dan efek *ratchet* atau *ratchet* anggaran. Bias perilaku yang pertama diwujudkan dengan dengan penurunan kapasitas kinerja yang mengakibatkan kesulitan pengukuran kapasitas kinerja riil manajemen, sedangkan yang kedua mengakibatkan anggaran menjadi kaku dan menghasilkan pertumbuhan anggaran yang tiidak efisien.

Efek *ratchet* dalam literatur ekonomi merupakan bentuk bias perilaki pada proses penyusunan anggaran yang disebabkan oleh penggunaan informasi kinerja periode sebelumnya sebagai basis bagi penentuan target kinerja melalui suatu proses negosiasi dalam konteks hubungan keagenan (Indjejikian & Nanda, 1999). Efek *ratchet* dalam anggaran terlihat dari kenaikan anggaran dari periode berikutnya sebagai respon atas vrian negatif anggaran periode sebelumnya.Varian kinerja periode sebelumnya merupakan infomasi yang relevan bagi prinsipal jika variana kinerja bersifat permanen. Penggunaan informasi kinerja periode sebelumnya dapat merevisi keyakinan prinsipal mengenai kapasitas kinerja agen dalam beberapa periode. Keunggulan relatig agen menciptakan asimetri informasi yang menyebabkan prinsipal keliru menilai kapasitas riil kinerja agen dan memberi kesempatan bagi agen untuk menurunkan kapasitas kinerja, menciptakan *slack* dan memodifikasi komponen akrual diskresioner atau manipulasi aktivitas riil (Bouwens & Kroos, 2011).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian kuantitatif jenis penelitian yang berlandasankan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Sumatera yang bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan Indonesia. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibuat oleh peneliti (Maulana, 2015). Kriteria-kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) Kota di Sumatera tahun 2018 dan 2019, serta realisasi anggaran tahun 2018, terdapat 38 Kota.
2. Memiliki data lengkap untuk mengukur keseluruhan variabel
3. Merupakan data APBD terbaru atau perbaharuan terakhir

Operasional Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari Belanja Daerah sebagai variabel dependen (Y), Pendapatan Sendiri sebagai variabel independen (X), dan *Budget Ratcheting* sebagai variabel pemoderasi (Z). Definisi dan pengukuran masing-masing variabel adalah:

1. Belanja Daerah (BD)

   Belanja daerah adalah sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yang merupakan kewajiban daerah dan diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam suatu tahun anggaran**.** Belanja daerah dalam penelitian ini diukur dengan jumlah belanja daerah untuk tahun anggaran 2014-2018.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan sendiri adalah penerimaan daerah yang bersumber dari potensi yang dimiliki daerah, yang ditetapkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam peraturan perundang-undangan. Komponen PAD mencakup pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penelitian ini, Pendapatan Sendiri diukur dengan jumlah PAD untuk tahun anggaran 2014-2018.
3. *Budget Ratcheting* (BR)

   Budget ratcheting adalah fenomena perilaku *moral hazard* oleh *agent* dalam menentukan target kinerja dengan menggunakan target tahun sebelumnya sebagai patokan. Pengukuran variabel ini menggunakan model dari Aranda, et al. (2010), dengan rumus seperti berikut:

   $$PAD_t - PAD_{t-1} = \delta + \gamma(PADR_{t-1} - PAD_{t-1}) + \varepsilon,$$

   dengan PAD_t adalah anggaran pendapatan asli daerah tahun t, PAD_{t-1} adalah anggaran PAD tahun t-1, δ adalah konstanta, γ adalah koefisien regresi, $PADR_{t-1}$ adalah realisasi PAD tahun t-1, dan ε adalah *error terms.* $PAD_t - PAD_{t-1}$ mengukur kenaikan anggaran PAD tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi anggaran PAD tahun lalu, sebagai cerminan adanya *ratcheting* dalam penentuan target PAD.

Metode Analisis

Analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda karena variabel bebas lebih dari satu.Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga

menunjukkan arah hubungan variabel dependen dan variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yangdiketahui (Ghozali, 2016).

Pengujian terhadap efek moderasi dan efek utama dengan menggunakan analisis regresi dapat dilakukan dengan metode yang disebut analisis regresi berjenjang (Jogiyanto, 2004:146). Pada metode ini, ada dua persamaan regresi yang dipakai, yakni (1) dengan memasukkan variabel independen utama dan pemoderasi dalam satu persacmaan dan kemudian (2) menambahkan variabel independen baru berupa interaksi kedua variabel independen. Kedua model tersebut dapat digambarkan seperti berikut:

$BD = a + b_1PAD + b_2BR + e$ …….. (Model I)

dan

$BD = a + b_1PAD + b_2BR + b_3 PAD*BR + e$ ……. .....(Model II),

Dengan BD adalah Belanja Daerah sebagai variabel terikat, PAD adalah Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel bebas dan BR adalah *Budget Ratcheting* sebagai variabel pemoderasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan sofware SPSS 20, diperoleh hasil perolehn pengolahan regresi pertama dan kedua, serta tabel persentase budget Ratcheting sebagai berikut :

Tabel 1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	,892a	0,796	0,790	1850687683743,583

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Tabel 2. Pengaruh Budget Ratcheting terhadap Hubungan antara PAD dan Belanja Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	,903[a]	,816	,805	1782430622029,319

a. Predictors: (Constant), Moderasi XZ,X PAD,ZBR

Tabel 3. Persentase Tingkat Budget Ratcheting Kota Se Sumatera

No	Nama Kota	Persentase Budget Ratcheting
1	Kota Palembang	65,90%
2	Kota Langsa	50,39%
3	Kota Padang	45,76%
4	Kota Tanjung Balai	30,28%
5	Kota Payakumbuh	16,56%
6	Kota Bukit Tinggi	16,29%
7	Kota Medan	13,79%
8	Kota Sungai Penuh	13,01%
9	Kota Bengkulu	10,56%
10	Kota Jambi	10,40%

Sumber : Data di olah

Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa PAD secara signifikan mempengaruhi total belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari besaran nilai sig value sesbesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja daerah. Koefisien regresi PAD sebesar 0,796 memiliki makna bahwa apabila terjadi peningkatan PAD sebesar 1% maka akan menaikkan total belanja sebesar 0,796 atau 79,6%.

Besaran koefisien determinasi sebesar 7,90 memiliki makna bahwa variasi dari kedua variabel independen dapat menjelaskan variasi total belanja daerah. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Atau dengan kata lain bahwa model ini dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi belanja daerah.

Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa adanya pengaruh *Budget Ratcheting dalam memperkuat* hubungan antara PAD dengan Belanja Daerah. Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai R square pada regresi pertama sebesar 0,796 atau 79,6 % setelah ada persamaan regresi kedua nilai R square naik menjadi 0,816 atau 81,6%. Dengan melihat hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan PAD dengan belanja daerah dapat diperkuat dengan *Budget Ratcheting.*

Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Kota Palembang merupakan kota yang memiliki tingkat budget ratcheting tertinggi di Sumatera dengan persentase 65,9% lalu kemudian diikuti oleh kota Langsa 50,39% dan Kota Padang 45,76 %.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PAD berpengaruh terhadap belanja daerah.
2. *Budget ratcheting* memperkuat hubungan antara PAD dengan Belanja Daerah.
3. Palembang merupakan kota dengan *Badget Ratcheting* tertinggi dibandingkan dengan kota lain di Sumatera

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy. (2008). *Penganggaran Partisipatif di Pemerintahan dan Bisnis: Perbedaan dan Isu-isu Penelitian*. Web: https://syukriy.wordpress.com/2008/12/25/penganggaran-partisipatif-di-pemerintahan-dan-bisnis-perbedaan-dan-isu-isu-penelitian/ (3/4/2015)

_____. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya:
Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. *Disertasi* (Tidak Dipublikasikan).Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

_____ & Abdul Halim. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah
Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan.
Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(2): 17-32.

_____ & Riza Rona. (2015). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana
Perimbangan terhadap Belanja Modal: Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. *Makalah* Dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi ke-II, IAI Wilayah Jawa Timur, di Universitas Kanjuruhan Malang, 29-30 April 2015.

Aranda, Carmen. (2010). Ratheting Effect and the Role of Relative Target Setting. *Working Paper*. University of Navarra, Spain. Web: https://research.mbs.ac.uk/accounting-finance/ Portals/0/docs/RatchingEffectandtheRoleofRelati veTargetSetting.pdf

Ardhani, Pungky. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Web: http://eprints. undip.ac.id/29410/1/Jurnal_Belanja_Modal.pdf (22/3/2015)

Axelrod, Donald. (1995). *Budgeting for Modern Government*. 2nd edition. New York: St. Martin's Press

Bouwens, Jan & Peter Kroos. (2010). Target Ratcheting and Effort Reduction. *Journal ofAccounting and Economics* 51(1-2): 171-185.

Brownell, Peter and Morris McInnes. (1986). Budgetary Participation, Motivation, and Managerial Performance. *The Accounting Review* 61(4): 587-600.

Carroll, D. (2009). Diversifying Municipal Government Revenue Structures: Fiscal Illusion or Instability? *Public Budgeting & Finance* 29: 27-48.

Costello, Anna M., Reining Petacchi, & Joseph Weber. (2012). The Hidden Consequences of Balanced Budget Requirements. Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology. *Working Paper*.

Cothran, Dan A. (1993). Entrepreneurial Budgeting: An Emerging Reform? *PublicAdministration Review* 53(5): 445-454.

Eita, Joel Hinaunye & Daisy Mbazima. (2008). *The Causal Relationship Between Government Revenue and Expenditure in Namibia. MPRA Paper No. 9154*. Online at http://mpra. ub.uni-muenchen.de/9154/

Fisher, J. G., L. A. Maines, S. A. Peffer, & G. B. Sprinkle. (2002). Using Budgets for Performance Evaluation: Effects of Resource Allocation and Horizontal Information Asymmetry on Budget Proposals, Budget Slack, and Performance. *Accounting Review* 77(4): 847-866.

Forrester, John. (2002). The Principal-Agent Model and Budget Theory. In Khan, Aman & W. Barthley Hildreth. 2002. *Budget Theory in the Public Sector*. Westport, Connecticut: Quorum Books.

Halim, Abdul. (2002). Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Disertasi Program Doktor Universitas Gadjah Mada.*

_____ & Syukriy Abdullah. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di PemerintahanDaerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.

Hamdani, Surya, Sri Mintarti, & Agus Setiawaty. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur.Web:https://www.academia.edu/10095917/

Hercowitz, Zvi and Michel Strawczynski. (2002). Cyclical Ratcheting in Government Spending: